

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan dan perpustakaan. Pada era globalisasi dan revolusi industri 4.0, perpustakaan tidak lagi berfungsi hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi cetak, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat layanan informasi digital. Transformasi tersebut terjadi di berbagai negara sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi digital.

Secara internasional, perpustakaan di berbagai negara maju telah mengembangkan konsep *digital library*, *smart library*, dan *electronic services* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna. Perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi digital, tetapi juga mengembangkan sistem pencarian informasi berbasis daring, repositori institusi, layanan referensi virtual, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pengelolaan informasi.

Transformasi layanan digital sejalan dengan paradigma Human Resources Management in the 21st Century (HRM in the 21st Century) yang menekankan bahwa sumber daya manusia merupakan aset strategis organisasi yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan lingkungan kerja digital. Dalam perspektif HRM abad ke-21, organisasi dituntut untuk mengembangkan kompetensi digital, meningkatkan kemampuan inovasi, serta membangun budaya kerja yang responsif terhadap perkembangan teknologi.¹ Oleh karena itu, keberhasilan implementasi layanan digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan SDM yang mengelola dan menjalankan layanan.

¹Ester van Laar, Alexander J. A. M. van Deursen, Jan A. G. M. van Dijk, dan Jos de Haan, "Determinants of 21st-Century Skills and 21st-Century Digital Skills for Workers: A Systematic Literature Review," SAGE Open 10, no. 1 (2020): 1–14.

Fenomena transformasi layanan perpustakaan secara global menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan era digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Berbagai perguruan tinggi di dunia telah menjadikan digitalisasi layanan perpustakaan sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan fenomena internasional tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan layanan era digital menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dalam mendukung pelayanan perpustakaan modern yang merupakan bagian dari Lembaga pendidikan. “Kita memasuki tahap krusial: refreezing kebijakan, yaitu fase penguatan dan pekembangan nilai-nilai baru yang telah diinisiasi melalui inovasi pendidikan”.² Inovasi pendidikan dapat di mulai dengan sistem informasi manajemen pendidikan (SIMDIK) yang relevan dapat melalui perpustakaan, pendidikan secara mandiri dalam meningkatkan literasi. Perkembangan abad 21 selain munculnya era globalisasi dan revolusi industri 4.0 dalam perjalanan masa kemasa hingga muncul nya era pandemic covid 19 di tahun 2019 pelayanan public mulai memaksimalkan penggunaan layananana digital, hal tersebut dapat tergambar dari beberapa data internasional tentang penggunaan layanan digital pada tabel 1.1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²A. Rusdiana. , *Strategi Implementasi Kebijakan Kurikulum Cinta, Deep Learnin dan Gapura Panca Waluya Menuju Indonesia Emas 2045*, Kompasiana 27 Juli 2025

Tabel 1. 1 Data Internasional Layanan Digital (2020–2024)

Aspek Layanan Digital	Tahun & Data	Keterangan	Sumber Resmi
1	2	3	4
Ekspor Jasa Digital (ICT Services)	2020: US\$676 miliar (14% dari ekspor jasa global)	Lonjakan selama pandemi COVID-19	UNCTAD (2021), <i>Trade and Development Report</i> ³
E-commerce Global	2019: US\$26,7 triliun	Mencakup perdagangan B2B dan B2C; naik drastis pasca COVID-19	UNCTAD (2021), <i>COVID-19 and E-commerce</i> ⁴
Transformasi Digital Perusahaan	2023: 91% perusahaan global melakukan investasi digital	Meningkatkan efisiensi & daya saing	Statista (2024) ⁵
Investasi AI dalam Layanan Publik	2024: US\$500 miliar	AI digunakan dalam layanan perpustakaan, kesehatan, dan pendidikan	OECD (2024) ⁶
Peningkatan Akses Digital Global	2020–2024: 65% populasi dunia online	Pertumbuhan signifikan akses digital di negara berkembang	ITU (2024) ⁷
Penggunaan Layanan Perpustakaan Digital	2024: 80% perpustakaan nasional di dunia memiliki sistem digital	Akses jurnal, katalog, dan koleksi multimedia daring	IFLA (2024) ⁸

Sumber : Dimodifikasi oleh penelitian (2026)

³ UNCTAD. (2021). *Trade and Development Report 2021*. United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org>

⁴ NCTAD. (2021). *Trade and Development Report 2021*. United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org>

⁵ UNCTAD. (2021). *COVID-19 and E-commerce: A Global Review*. Statistika. (2024). *Share of companies investing in digital transformation worldwide 2023*.

⁶ OECD. (2024). *AI in the Public Sector: Investments and Applications*. Organisation for Economic Co-operation and Development

⁷ ITU. (2024). *Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024*. International Telecommunication Union.

⁸ IFLA. (2024). *World Library and Information Congress Report*. International Federation of Library Associations and Institutions.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa lonjakan penggunaan layanan digital tingkat internasional, setelah adanya covid 19. Mulai dari ekspor Jasa digital, transformasi digital oleh perusahaan atau layanan public serta perpustakaan seluruh dunia , membuktikan era digital sangat dibutuhkan dan akan terus berkembang.

Tahun 2020 di Indonesia awal munculnya titik fokus prioritas pemerintah pada Implementasi kebijakan digital diakibatkan adanya covid 19 dimana pemerintah indonesia bertindak cepat dalam menangani permasalahan nasional. Dimana layanan tatap muka menjadi layanan berbasis digital yang di kembangkan untuk menstabilkan situasi ditengah pandemic. Dengan munculnya situasi darurat pemerintah segera mengambil tindakan cepat melalui Siaran Pers Kominfo 2020–2021 dan Transformasi Digital Perguruan Tinggi” yaitu SP No 138/HM/KOMINFO/10/2020 dan SP No 369 Tahun 2021. Dan juga Buku Putih Strategi Digital Nasional 2023–2030 dan Transformasi Digital Perguruan Tinggi dan kebijakan kebijakan lain yang mendukung tentang penggunaan digital. Kebijakan tersebut salah satunya berkaitan dengan pendidikan termasuk perguruan tinggi di Indonesia dan di implementasikan melalui kebijakan intern, hasil implementasi kebijakan layanan digital menunjukkan perubahan pelayanan digital. Layanan perpustakaan mendukung pendidikan di perguruan tinggi yang di implementasikan melalui pengadaan layanan digital. Fenomena dapat dilihat dari beberapa sampel perguruan tinggi yang telah di teliti, berikut merupakan data tentang perkembangan pelayanan digital di perguruan tinggi pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Layanan Perpus Digital Perguruan Tinggi Indonesia

Tahun Periode	Tingkat Pemanfaatan Digital (%)	Inovasi / Layanan Digital Utama	Sumber
1	2	3	4
Pra-Pandemi (2019–awal 2020)	20–30%	OPAC terbatas, e-book hanya di sebagian PTN/PTS	Kompasiana (2021) ⁹ ; Suharso et al. (2020) ¹⁰
2021	60%	Katalog online, e-journal, Indonesia One Search (IOS) naik pengunjung	Perpusnas RI (2021) ¹¹
2022	70%	Digitalisasi arsip, penguatan e- library, scanning koleksi	Prianto (2022) ¹²
2023	80%	SLiMS, integrasi e-resources, remote access mahasiswa	Setyawan (2025) ¹³
2024	85%	Aplikasi mobile (Touch & Go), layanan digital penuh	UIN Jakarta Library (2024) ¹⁴
2025 (estimasi)	90%	Smart library, interoperabilitas nasional antar-perguruan tinggi	Kompasiana / FPPTI (2021) ¹⁵

Sumber : dimodifikasi oleh penelitian (2026)

Tabel 1.2 merupakan sampel penggunaan digital dilingkungan pendidikan sangat dibutuhkan di perguruan tinggi bagian layanan perpustakaan menunjukkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi sebagai pusat informasi memprioritaskan layanan digital, di indonesialayanan perpustakaan digital perguruan tinggi lonjakan terlihat signifikan, sejak 2021 sebagai dampak langsung dari pandemi COVID-19. Se belum pandemi, pemanfaatan digital di perpustakaan hanya 20–30%, terbatas pada katalog online (OPAC) dan sedikit koleksi e-book.Tahun

⁹ Kompasiana / FPPTI. *Transformasi Perpustakaan Digital: Meningkatkan Akses, Efisiensi, dan Kualitas Pendidikan Tinggi*. Kompasiana (2021)

¹⁰ Kompasiana / FPPTI. *Transformasi Perpustakaan Digital: Meningkatkan Akses, Efisiensi, dan Kualitas Pendidikan Tinggi*. Kompasiana (2021)

¹¹Perpustakaan Nasional RI. (2021, 30 November). *Peran Perpustakaan Digital dalam Mendukung Dunia Pendidikan*.

¹²Prianto, J. S. *Membangun Perpustakaan Digital UII*. *Buletin Perpustakaan*, Universitas Islam Indonesia 2021.

¹³Setyawan, W. B. *Transformasi Perpustakaan UII melalui Teknologi dan Akreditasi Menuju Internasionalisasi Layanan*. *Buletin Perpustakaan* 2025, 8(1), 151–163.

¹⁴Pusat Perpustakaan UIN Jakarta. 2024

¹⁵Kompasiana / FPPTI. *Transformasi Perpustakaan Digital: Meningkatkan Akses, Efisiensi, dan Kualitas Pendidikan Tinggi*. Kompasian 2021.

2021 menandai lompatan besar ke 60%, seiring peningkatan penggunaan portal digital seperti Indonesia OneSearch (IOS). Dari thn. 2022 hingga thn. 2024, terjadi peningkatan bertahap, ditandai dengan digitalisasi arsip, integrasi sistem manajemen perpustakaan digital seperti SLiMS, serta adopsi aplikasi mobile dan remote access. Diproyeksikan pada 2025, 90% perguruan tinggi di Indonesia akan menerapkan layanan perpustakaan digital penuh, dengan konsep Smart Library dan interoperabilitas antar-kampus sebagai fitur utama.

Fenomena lain, meskipun perubahan signifikan akan digital namun menurut Indikator Pendidikan 1994-2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), pendidikan nonformal yang mencakup paket A setara SD/MI masih menunjukkan “ angka partisipasi yang jauh lebih rendah dibanding pendidikan formal meskipun terdapat upaya peningkatan”.¹⁶ Hal ini turut berpengaruh pada layanan pendukung pendidikan, termasuk perpustakaan perguruan tinggi. Dari informasi tersebut menunjukkan secara keseluruhan pemanfaatan layanan digital sangat efektif di era masa kini dengan aplikasi berbagai macam namun disisi lain belum maksimal dalam mewujudkan layanan yang dapat akses bagi pengguna.

Meninjau ulang, seiring dengan kebutuhan pengguna dan menciptakan akses layanan yang lebih terjangkau maka setiap perguruan tinggi berusaha meningkatkan layanan digitalnya melalui perpustakaan. Seperti pada tabel 1.3 mengenai layanan digital perguruan tinggi di Jawa Barat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁶Badan Pusat Statistik. *Indikator pendidikan 1994–2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik 2024.

Tabel 1. 3 layanan digital di perpustakaan perguruan tinggi Jawa Barat

Thn.	Institusi/ Tingkat	Jenis Layanan Digital	Ringkasan Penggunaan / Tren
1	2	3	4
2020	Perguruan Tinggi Jawa Barat & Dinas Disarpus Jabar	Virtual Reference (chat/email) + OPAC online	Layanan referensi virtual mulai tersedia menggantikan layanan fisik yang ditutup; OPAC digunakan secara daring. ¹⁷
2020	Disarpus Kabupaten Bandung	Perpustakaan Digital i-Sabilulungan (e-library app)	Akses digital melalui aplikasi perpustakaan daerah sebagai alternatif utama selama pandemi. ¹⁸
2022–2024	Universitas Padjadjaran (Unpad)	Hybrid learning support & E-resources (OPAC, database, e-books/journals)	Unpad memperluas akses digital panduannya ke luar kampus, menyediakan akses ke 9 database, koleksi digital lebih dari 50 juta artikel. ¹⁹

Sumber : dimodifikasi oleh peneliti (2026)

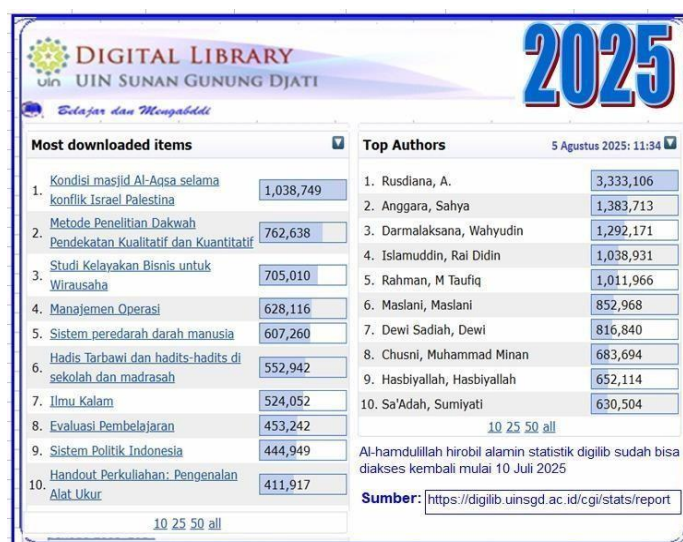
Dapat diamati pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa kemajuan dalam meningkatkan layanan digital dari sudut kebermanfaatan layanan di era masa kini. Jawa Barat di tahun 2020 hingga 2024 adanya menunjukkan kemajuan dari jenis layanan dengan aplikasi yang lebih mempermudah kebutuhan pengguna di era digital.

Di Jawa Barat terdapat banyak perguruan tinggi yang menyediakan perpustakaan digital. Penggunaan akses mobile layanan digital menjadi media yang diminati sumber daya manusia di era ini, dapat dilihat dari lokasi yang diteliti yaitu perpustakaan Pusat dan perpustakaan pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati. Dapat dilihat dari data penggunaan layanan digital yang dipublikasikan oleh Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati pada gambar 1.1.

¹⁷Susilowati. *Layanan Referensi Virtual Sebagai Strategi Pelayanan di Masa Pandemi Covid-19*. Abdi Pustaka: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan, 2021, 1.2: 60-66.

¹⁸Lestari, A. D., Sukaesih, S., Rukmana, E. N., & Rohman, A. S. Perpustakaan digital sebagai alternatif utama Kabupaten Bandung. *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* Jurnal Uin Syahada 2021.

¹⁹Kantor Pengelolaan Perpustakaan Unpad. Perpustakaan Pusat Unpad perbanyak fasilitas pembeajaran hybrid. 2022. Unpad News Universitas Padjadjaran+1kandaga.unpad.ac.id+1



Gambar 1. 1 Statistik Digilib Data

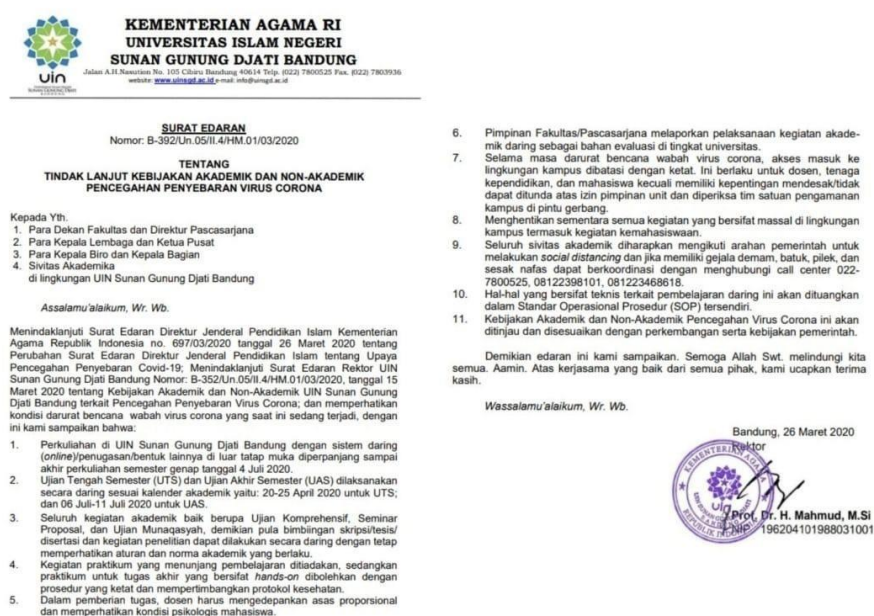
Sumber : digilib.uinsgd.ac.id di screenshot oleh peneliti (2026)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa akses terhadap layanan digital perpustakaan meningkat pesat sampai dengan 2025. Pengguna memanfaatkan platform digital untuk mengakses berbagai sumber akademik secara fleksibel. Topik paling banyak diunduh adalah “Kondisi Masjid Al-Aqsa selama konflik Israel Palestina” (1.038.749 unduhan), mencerminkan kepedulian terhadap isu aktual dan religius. Disusul oleh karya metodologi dan kewirausahaan, menunjukkan tingginya minat terhadap referensi akademik dan praktis. Penulis Terpopuler Prof.

H. A. Rusdiana, M.M. menjadi penulis paling diminati, dengan total akses mencapai 3.333.106kali. Memberikan inspirasi bagi generasi muda atau penulis lain untuk memicu karya tulis yang bermanfaat. Diikuti oleh Anggara, Sahya dan Darmalaksana, Wahyudin, yang juga konsisten menyumbang konten ilmiah berkualitas tinggi. Adapun mengenai tentang adanya kebijakan digital yang diawali situasi pandemic yang sangat perlu pemerintah segera mengambil Langkah Kebijakan Digitalisasi agar layanan public tetap berjalan. Kebijakan digitalisasi perpustakaan yang diadopsi selama pandemi telah menjadi solusi utama dalam mendukung pembelajaran jarak jauh, akses literasi ilmiah, dan efisiensi akademik di era pascapandemi (endemi). Kebijakan *urgent* dari pemerintah melalui Siaran Pers Kominfo 2020– 2021 dan Transformasi Digital

Perguruan Tinggi. Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut perpustakaan perguruan tinggi di UIN sunan gunung djati mengambil langkah-langkah strategi. dengan menggulirkan kebijakan teknis layanan termasuk layanan perpustakaan Surat edaran Rektor nomor B-35/Un.05/II.4/HM.01/03/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang kebijakan akademik dan non akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung terkait pencegahan virus corona dan **surat edaran Rektor Nomor B-392/Un.05/II.4/HM.01/03/2020** tanggal 26 Maret 2020 tentang tindak lanjut kebijakan akademik dan non akademik (Ilham Nurfauzi,2020) .²⁰

Kebijakan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 .



Gambar 1.2 Surat Edaran Rektor UIN sunan Gunung Djati

Sumber : fst.uinsgd.ac.id

Pada gambar 1.2 kebijakan Rektor terkait tindak lanjut penanganan covid terutama aktivitas melalui daring berpengaruh pada sub sub unit dilingkungan UIN Sunan gunung djati termasuk implementasikan kebijakan di lingkungan perpustakaan pusat dan perpustakaan pasca sarjana yang peneliti teliti. Kebijakan mencakup pelayanan secara tidak langsung dengan dilarangnya layanan tatap

²⁰ Ilham Nurfauzi, S.I.Pust. *UIN Bandung Raih Peringkat 1 di Indonesia Versi Scimago Institute Rangkings (SIR)*. <https://lib.uinsgd.ac.id/publikasi.html?start=36>

muka dimana layanan tidak di perkenalkan dilakukan secara langsung. Karena layanan harus tetap berjalan, maka melalui pengayaan digital yang dimaksimalkan untuk segera diimplementasikan. Membahas mengenai implementasi tidak lepas dari proses implementasi yang di pengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan implementasi. Seperti yang diungkapkan dan di pertanyakan oleh edwar III (1980), yaitu :

1).Prakondisi yang harus ada agar implementasi berhasil?, 2) Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi?. Setelah mengkaji dua pendekatan tersebut , Edwar (1980) menemukan empat variabel penting yang harus diperhatikan untuk melihat keberkaitan berbagai faktor terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (A.Rusdiana,2015)²¹.

Dari yang diungkapkan prof. Rusdianan adanya gambaran untuk menelaah dua variabel yaitu variabel kebijakan dan variabel layanan, penulis melakukan studi awal tentang implementasi kebijakan layanan era digital yang merupakan layanan pendidikan melalui pendidikan non formal di perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati fokus pada perpustakaan pusat dan perpustakaan pasca sarjana.

Dalam praktiknya ditemukan sejumlah kesenjangan yang menghambat implementasi kebijakan layanan digital. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pustakawan, yang semakin berkurang akibat mutasi dan pensiun, sementara kebutuhan pelayanan digital justru semakin meningkat. Kedua, terdapat perbedaan kebijakan layanan digital antara Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan pasca meskipun keduanya berada dalam satu institusi yang sama. Ketiga, birokrasi seperti apa sehingga ada perbedaan kebijakan kedua perpustakaan tersebut dan ke empat ada indikasi pengadaan SDM yang tidak sesuai kebutuhan ini ada indikasi kebijakan Kementerian Agama yang berbelit membuat pengajuan kebutuhan tambahan pustakawan tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan ketimpangan antara kebijakan nasional dengan realitas lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya gap jarak antara kebijakan ideal yang

²¹A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan : Dari filosofi ke implementasi*. Bandung: Pustaka setia, 2015

dirumuskan pemerintah dengan implementasi di tingkat operasional sehingga implementasi layanan digital.

Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Perkembangan era digital yang pesat, diperkuat dengan kebijakan nasional seperti Siaran Pers Kominfo dan Strategi Digital Nasional 2023–2030, menuntut perguruan tinggi, termasuk perpustakaan, untuk segera beradaptasi dalam menyediakan layanan digital yang efektif. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, melainkan juga pada kesiapan sumber daya, tata kelola birokrasi, serta disposisi pustakawan sebagai ujung tombak layanan. Jika kesenjangan ini tidak diatasi, tujuan utama digitalisasi, yaitu meningkatkan literasi, akses pengetahuan, dan kualitas layanan, akan sulit tercapai. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk dilakukan guna menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan layanan era digital di Perpustakaan pusat dan perpustakaan pasca UIN Sunan Gunung Djati, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan yang aplikatif bagi perguruan tinggi Islam di era digital.

Penelitian ini penting karena memberikan kontribusi akademik berupa pengayaan literatur manajemen pendidikan Islam dan menawarkan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan layanan digital, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan perpustakaan pasca, memberikan rekomendasi praktis untuk penguatan layanan digital, untuk kebutuhan mahasiswa/dosen dan mendukung penguatan literasi digital civitas akademika serta membantu Lembaga Pendidikan Islam lebih siap menghadapi transformasi digital & globalisasi pendidikan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian : **“Implementasi Kebijakan Layanan Era Digital di Perpustakaan pusat dan perpustakaan pasca sarjana di UIN Sunan Gunung Djati.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama dalam pengoptimalisasian layanan era digital di Perpustakaan pusat dan pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati terletak pada belum optimalnya implementasi kebijakan layanan digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor tersebut. Rumusan masalah tersebut kemudian di-brakedown menjadi beberapa sub-masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi kebijakan layanan era digital di Perpustakaan pusat dan pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
2. Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan layanan era digital di Perpustakaan pusat dan pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Bagaimana disposisi atau sikap pustakawan dan petugas dalam melaksanakan kebijakan layanan era digital di Perpustakaan pusat dan pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
4. Bagaimana struktur birokrasi dapat berkontribusi pada implementasi kebijakan layanan era digital di Perpustakaan Pusat dan pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan :

Menganalisis komunikasi kebijakan layanan era digital di pusat dan pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1. Menganalisis komunikasi kebijakan layanan era digital di pusat dan pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Mendeskripsikan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan layanan era digital di Perpustakaan pusat dan Pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Mengaji disposisi pustakawan dan petugas dalam melaksanakan kebijakan

layanan era digital di Perpustakaan pusat dan Pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

4. Mengkaji peran struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan layanan era digital di Perpustakaan Pusat dan Pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang telah peneliti susun dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah literatur dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya terkait implementasi kebijakan layanan era digital Studi Kasus di perpustakaan pusat dan pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik implementasi layanan kebijakan yang efektif di perpustakaan, serta menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam menghadapi transformasi digital dan mengukur dampak pada pustakawan, petugas perpustakaan dan tenaga tendik seperti tenaga I.T.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa sebagai pemustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa dalam menciptakan budaya literasi dan peningkatan literasi yang lebih efektif dan efisien melalui keijakan layanan digital. Implementasi kebijakan layanan digital harus dapat memberikan solusi bagi pengguna layanan yaitu mahasiswa dan pustakawan memahami nilai-nilai positif dari implementasi kebijakan layanan digital perpustakaan dapat terlihat hasilnya dari mutu literasi digital mahasiswa, melalui pustakawan layanan digital dapat dikembangkan atau digunakan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa UIN sunan Gunung Djati yang otomatis merupakan pemustaka di Perpustakaan yaitu kelengkapan e kolesi seperti e book, e jurnal proquest, imareva, ebsco, fambrig, repository dan e book lokal yaituada situs e Librarry.uin.ac.id.

- b. Bagi Kepala Perpustakaan, ketua sub dan penanggung jawab, hasil penelitian ini akan memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan terkait Implementasi kebijakan layanan era digital, dapat mengambil nilai positif terhadap dampaknya dari implementasi tersebut. Ketua perpustakaan dapat menemukan temuan ini untuk menyesuaikan strategi manajerial yang ada, sehingga dapat meningkatkan mutu layanan digital di era digital yang kian berkembang pesat.
- c. Pustakawan, petugas perpustakaan dan tenaga tendik diperpustakaan termasuk tenaga I.T, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan mengenai teknik-teknik implementasi kebijakan layanan era digital. Dengan demikian dapat lebih memahami dan berkolaborasi dalam berkerjasama mendukung layanan digital secara umum dan khususnya di perpustakaan untuk meningkatkan budaya literasi digital mahasiswa melalui koleksi perpustakaan.
- d. Bagi Pembaca atau peneliti lain yang tertarik dengan kebijakan, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk studi lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan layanan era digital dalam menghadapi transformasi digital, khususnya di perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pustaka atau peneliti. Temuan dari penelitian ini bisa menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang mengeksplorasi aspek-aspek lain dari kebijakan layanan era digital.

E. Kerangka Berfikir

Penelitian ini akan menganalisis dan mengidentifikasi implementasi kebijakan layanan era digital. Identifikasi implementasi kebijakan layanan era digital Pada perpustakaan pusat dan perpustakaan pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati ini meliputi latar belakang kebijakan layanan era digital dan implementasi kebijakan layanan era digital di perpustakaan pusat dan pasca sarjana universitas islam negreri Sunan gunung djati Bandung. “Teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar penelitian dimasukkan ke dalam kerangka berpikir, yang didefinisikan sebagai kerangka pemikiran, yang merupakan dasar untuk penelitian yang dibangun berdasarkan fakta-fakta,

observasi, dan studi kepustakaan“.²²

Dalam penelitian kualitatif, “ kerangka berfikir adalah cerita (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep yang diidentifikasi atau dirumuskan untuk memecahkan masalah “.²³

Latar belakang munculnya kebijakan yang membumih diawali oleh adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh negara, khususnya pemerintah indonesia, menjadi faktor utama mengapa pentingnya pelayanan digital secara maksimal agar aktivitas layanan tetap berjalan ditengah pandemi, ini juga berdampak pada perpustakaan di berbagai jenjang pendidikan termasuk perpustakaan perguruan tinggi yang perlu menerapkan kebijakan digital, seperti penggunaan e-library, e jurnal dan akses digital repository, pelayanan referensi secara daring, pelatihan informasi secara virtual, pemesanan dan peminjaman buku serta bebas pustaka sesuai kebijakan perpustakaan tentunya secara online atau tanpa pelayanan tatap muka.

1. Kebijakan publik dan pemahaman sebagai landasan

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan.²⁴

Fungsi kebijakan di sini berhubungan dengan rumusan perihal berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan. Pada perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati kebijakan public di implementasikan melalui layanan digital dimana layanan era digital menjadi fokus utama terutama masa pamdemi kebijakan baru telah dilakukan agar pelayanan perpustakaan tetap berjalan hingga perubahan perkembangan digital tetap dimanfaatkan pada masa setelah pandemi. Pada buku Dwiyanto Indiahono pada bukunya berjudul Kebijakan publik berbasis

²²Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia dan Ramadani Syafitri, “Kerangka berfikir penelitian kuantitatif,” Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran 2, no.1 (2023): 160–66

²³Sukuryadi Arif dan Fatimaturrahmi, “Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar Di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ips Terpadu Smp Negeri 1 Praya Barat,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 1, no. 2 (2017): 108–16.

²⁴Edi Suharto, Ph.D. Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Pernebit : Alfabeta Bandung, cv. Cetakan 2015. Anggota IKAPI.

Dinamika Policy Analysis mencantumkan ilmuwan bernama Hogwood dan Gunn (1984 dalam Parson. 2006-cetak kedua: menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern.²⁵ Yaitu sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai “hasil” (outcome) dan sebagai teori dan model serta sebagai sebuah proses.

Teori kebijakan George C. Edward III (sering disebut *Model Implementasi Kebijakan Edward III*) adalah salah satu teori yang paling terkenal dalam kajian implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ada 4, sebagaimana yang dikatakan Edwards III “..... *four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitudes and bureaucratic structure*”.²⁶

Keempat variabel tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan layanan digital diimplementasikan di Perpustakaan pusat dan pasca sarjanan UIN Sunan Gunung Djati. Implementasi kebijakan terutama kebijakan layanan era digital di butuhkan sumber daya manusia yang perlu siap dalam menerima perubahan. Jika SDM tidak siap dengan perubahan akan muncul masalah dalam implementasi kebijakan tersebut, karena SDM harus mampu bersaing di era digital ini maka kebijakan layanan menjadi digital yang lebih memudahkan dan sangat di perlukan, jangankan di lingkup kecil seperti SDM di perpustakaan UIN di lingkup global sangat berpengaruh besar seperti negara kita Indonesia akan lemah jika dikaitkan dengan persaingan kerja secara global baik di dunia pendidikan atau non pendidikan diperlukan adanya pengelolaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasbiyallah bahwa “Pengelolaan sumber daya manusia dalam ruang lingkup pendidikan merupakan salah satu upaya dalam mengantisipasi keterbukaan persaingan kerja pada era globalisasi di masa

²⁵Dwiyanto Indiahono, Kebijakan publik : berbasis Dynamic Policy Analysis. Penerbit Gava Media Yogyakarta . cetakan , 2009 . Anggota IKAPI DIY. ISBN: 078-979-1078-91-7

²⁶Jumroh dan M. Yoga Jusri Pratama. *Implementasi pelayanan publik : teori dan praktik* . Insan Cendekia Mandiri: Publisher of educations books, 2021: 1-232.

yang akan datang”.²⁷

Selain sumberdaya manusia, poin lain dari teori George Edward III menekankan bahwa implementasi kebijakan publik bukan hanya soal merumuskan kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan itu dijalankan di lapangan, baik faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi harus diperhatikan dan dikelola dengan baik agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif (A.Rusdiana, 2023).²⁸

Perubahan akan menjadi lebih baik jika kita berupaya melakukan perencanaan perubahan itu sendiri tanpa berpangku tangan dengan berupaya melakukan perubahan maka tidak akan sia-sia, melalui kebijakan maka ada peluang kearah yang lebih baik sebagaimana firman Allah S.W.T mengenai ihtiar untuk melakukan perubahan. Al Qur“an surat ArRa“d ayat 11 Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. ArRa“d: 11) ²⁹.

Dari ayat Al quran diatas bahwa perlu adanya perubahan dari diri sendiri atau perubahan yang dilakukan organisasi untuk kearah yang lebih baik. Jika kita sebagai manusia mau berusaha menghadapi tantangan perubahan tentunya harus merubah diri sendiri atau merubah organisasi melalui kebijakan untuk menghadapi tantangan itu sendiri. .

Begitu pula tentang layanan yang ideal, di butuhkan perubahan kearah digital yang lebih baik melalui kebijakan yang di implementasikan. Kebijakan di implikasi melalui teori edward III dapat di jabarkan melalui tabel 1.4

²⁷ Hasbiyallah dan Nayif Sujudi. “Pengelolaan Pendidikan Teori dan Praktek pada Lembaga Pendidikan Islam (Perspektif Pendidikan Islam”. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019:117. 29 Mar 2023 01:04. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/66534>

²⁸A. Rusdiana, A. (2023). *Kebijakan Pendidikan : Dari filosofi ke implementasi*. Bandung : CV Pustaka setia, 2015.

²⁹SuratAr-Ra“d Ayat 11 | Tafsiro.com”. 22 September 2022. <https://tafsiro.com/13-ar-rad/ayat-11#tafsir-quraish-shihab>.

Tabel 1. 4 Implikasi kebijakan

No	Variabel Teori Edward III	Fokus Penelitian	Indikator Operasional
	1	2	3
1	Komunikasi	Proses penyampaian dan pemahaman kebijakan layanan era digital di perpustakaan pusat dan pasca pascasarjana UIN Bandung.	(a) Transmisi yang digunakan dalam menyampaikan kebijakan ; (b) Kejelasan isi kebijakan layanan digital; (c) Konsistensi informasi kebijakan;
2	Sumber Daya	Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam implementasi layanan digital	(a) Jumlah dan kompetensi pustakawan/ staf; (b) Ketersediaan sarana dan prasarana TIK; (c) Dukungan anggaran layanan digital; (d) Pelatihan dan pengembangan SDM
3	Disposisi (Sikap Pelaksana)	Sikap, komitmen, dan kesiapan pustakawan dalam melaksanakan kebijakan layanan digital	(a) Komitmen dan tanggung jawab pelaksana; (b) Insentif Pengan&pengakatan birokrat
4	Struktur Birokrasi	Mekanisme organisasi dan prosedur pelaksanaan layanan digital	(a) Ketersediaan SOP layanan digital; (b) Alur pengambilan keputusan / struktur organisasi; (c) Kejelasan pembagian tugas Koordinasi antar unit kerja

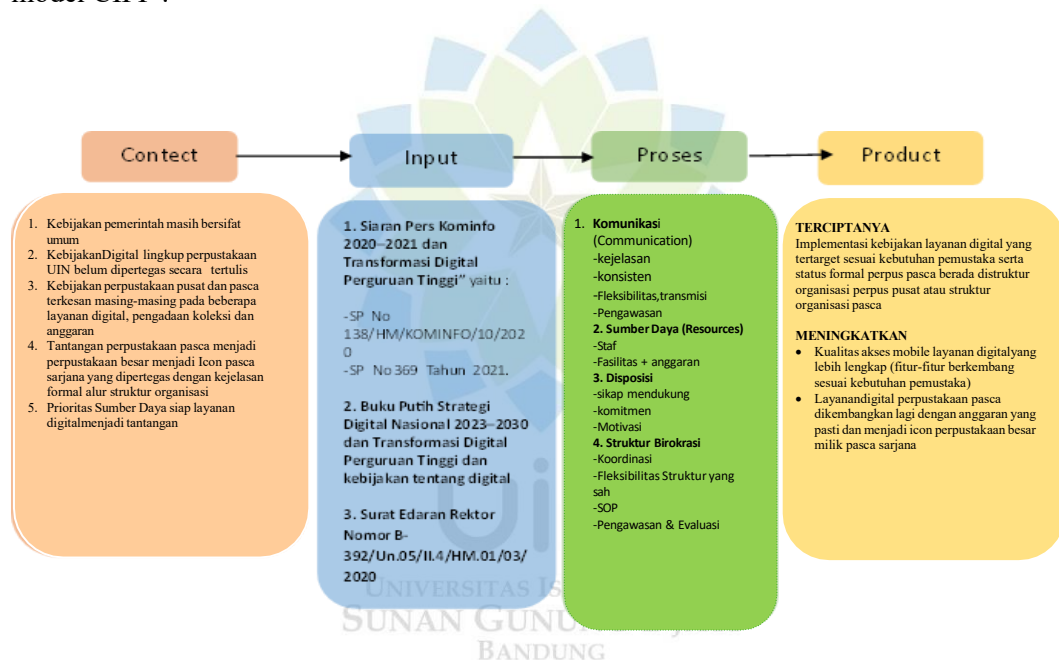
Sumber: Buku Implementasi Kebijakan Publik (Transformasi Pikiran George Edwards)

Tabel 1.4 menjelaskan aspek-aspek yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan layanan era digital dimana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan formal, namun perlunya mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, dan melibatkan sumber daya, diterima oleh pelaksana melalui sikap pelaksana yang mendukung, serta difasilitasi oleh struktur birokrasi yang efektif.

Implementasi kebijakan layanan digital yang efektif akan menghasilkan sistem layanan yang terintegrasi, responsif, dan berbasis kebutuhan pengguna. Produk kebijakan tersebut ditandai dengan tersedianya akses digital yang semakin berkualitas, baik dari segi kelengkapan fitur, akurasi informasi, ketersediaan tautan (link) yang relevan, maupun kemudahan akses terhadap sumber-sumber referensi akademik. Implementasi kebijakan layanan digital di perpustakaan pusat UIN Sunan gunung djati tercermin pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan

yang kemudian dapat diadopsi atau direplikasi pada unit-unit layanan lain, seperti perpustakaan pasca sarjana, maupun sebaliknya. Sinergi antar unit ini menunjukkan adanya penguatan sistem layanan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya, produk kebijakan tidak hanya menghasilkan perubahan pada tataran teknis layanan digital, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan menuju perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan era digital.

Berdasarkan paparan diatas maka gambaran kerangka berfikir Implementasi kebijakan layanan era Digital dijelaskan pada gambar 1. 2 bagan kerangka berfikir model CIPP .



Gambar 1. 3 Bagan Kerangka berfikir
Sumber : Diadopsi dari model CIPP (2026)

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian berkaitan dengan kebijakan layanan era digital telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya (terdahulu) di tahun 2021 s.d 2025, berikut ini beberapa gambaran dari penelitian terdahulu, diantaranya :

1. Rydho Febri Ramadhan,& Vicka Tamaya (2021)

Melakukan penelitian dengan judul Standar Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pelayanan Perpustakaan ITERA (Public Service Standards during the Covid-19 Pandemic: ITERA Library Service Study)³⁰

Tujuan penelitian jurnal ini adalah Untuk mengkaji perubahan dalam layanan publik selama pandemi. Metodologi Penelitian dengan Pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan informasi dan data melalui metode wawancara. Selain melakukan wawancara, penelitimencari dan membaca berbagai informasi tentang penerapan layanan perpustakaan ITERA melalui situs web dan Prosedur Operasi Standar layanan selama pandemi. Adapun hasil penelitian adalah Pandemi Covid-19 memengaruhi layanan publik, terutama di Perpustakaan ITERA. Perubahan Standar Pelayanan Publik Perpustakaan ITERA menghasilkan inovasi dalam layanan Perpustakaan Institut Teknologi Sumatera.

2. Wildani A., dkk (2022)

Melakukan penelitian dengan judul Strategi Optimalisasi Pelayanan Sirkulasi Dengan Pendekatan Model Harapan Sosial: Studi Pada Perpustakaan UNRI Pascagangguan Alam³¹.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran optimalisasi perbaikan ruangan sirkulasi paska kerusakan infrastruktur akibat gangguan alam. Penelitian ini menggunakan metode Research And Development (R&D). Metode analisis ini banyak digunakan dalam riset pengembangan sebuah produk inovasi, termasuk di dalamnya dapat digunakan dalam optimalisasi pelayanan sirkulasi. Gambaran

³⁰Ramadhan, R.F dan Vicka, T. *Standar Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid- 19: Studi Pelayanan Perpustakaan ITERA (Public Service Standards during the Covid-19 Pandemic: ITERA Library Service Study Study)*. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasipol) 2021, 1(1), 57-66.

³¹Wildani, A. *Studi terhadap peran dan strategi layanan perpustakaan perguruan tinggi swasta di Pekanbaru pada masa pandemi COVID-19*. Jurnal Gema Pustakawan 2022, 10(1), 1-

ringkas dari konsep ini adalah tahapan penelitian yang digambarkan melalui diagram “Fase riset harapan sosial”. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa gangguan alam berupa gangguan binatang telah menyebabkan kerusakan pada bagian atas perpustakaan terutama pada bagian ruang sirkulasi. Akibat kejadian tersebut terjadi kerusakan infrastruktur ruang sirkulasi yang harus segera dilakukan penanganan segera.

Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa pengguna merasa puas dengan pengembangan yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan sirkulasi paska kerusakan infrastruktur gangguan alam telah berjalan dengan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang paling tepat untuk diterapkan perpustakaan dalam mengembangkan koleksinya bagi pemustaka dengan menyesuaikan situasi era new normal. Hasilnya Strategi tersebut dapat secara fleksibel disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar masing-masing perpustakaan, asalkan tetap berpegang pada prinsip yaitu berorientasi pada pengguna.

3. Dian Sinaga&Fitri Perdana (2023)

Melakukan penelitian dengan judul strategi pengembangan koleksi perpustakaan umum di era kenormalan baru³². Pembahasan dari penelitian ini secara khusus membahas tentang strategi yang perlu dibentuk oleh perpustakaan umum daerah dalam mengembangkan koleksinya sebagai bagian dari upaya membangkitkan kembali minat kunjungan masyarakat dalam memasuki era new normal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang paling tepat untuk diterapkan perpustakaan dalam mengembangkan koleksinya bagi pemustaka dengan menyesuaikan situasi era new normal. Hasilnya Strategi tersebut dapat secara fleksibel disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar masing-masing perpustakaan, asalkan tetap berpegang pada prinsip yaitu berorientasi pada pengguna.

³²Sinaga, D., dan Perdana, F . *Strategi pengembangan koleksi perpustakaan umum di era kenormalan baru*. Kabuyuta 2023, 2(2), 87-91.

2. Cantika Fitria Putri Fardi Dkk (2024)

Melakukan penelitian dengan Judul penelitian Perkembangan Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi³³. Permasalahannya Kesulitan pemustaka dalam melakukan penelusuran informasi menjadi acuan bagi perpustakaan untuk berkembang sesuai perubahan. Tujuannya untuk mengetahui dan menelaah secara mendalam perkembangan pelayanan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah narrative literature review dari rujukan yang berkaitan dengan pelayanan perpustakaan perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan perpustakaan dibagi menjadi dua, yaitu layanan teknis dan layanan pengguna. Pada pelayanan teknis terjadi proses pengolahan bahan pustaka sebelum dilayankan, sedangkan layanan pengguna merupakan layanan yang berhubungan langsung dengan pemustaka, seperti: layanan ruang baca, layanan sirkulasi, layanan referensi, OPAC (*Online Public Access Catalogue*), dll. Inovasi layanan perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan website. Inovasi yang dikembangkan yaitu pembangunan perpustakaan digital, layanan ask librarian, layanan book delivery, serta adanya layanan library movie show. Dampak yang dirasakan oleh pemustaka dengan layanan digital yaitu: kegiatan penelusuran informasi dilakukan dengan nyaman, mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Kesimpulannya, pelayanan perpustakaan perguruan tinggi sudah berkembang seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Diah Sa'adiyah (2025)

Melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Layanan Informasi Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten selama Pandemi COVID-19 Diah Sa'adiyah.³⁴ Penelitian ini mengenai kebutuhan informasi di perpustakaan yang perlu dipenuhi untuk mendukung pemustaka, terutama dalam

³³ardi, C. F. P., Anwar, R. K., Amar, S. C. D., dan Rukmana, E. N.. *Perkembangan Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi*. ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan 2024, 4(2), 60-72.

³⁴Sa'adiyah, D. Efektivitas Layanan Informasi Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Pendidikan Indonesia:Teori, Penelitian, dan Inovasi* 2025, 5(2).

kondisi pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas layanan informasi daring di Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan observasi terhadap platform digital perpustakaan, seperti OPAC, repository, layanan e-book, dan e-jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi efektivitas dilakukan dengan analisis fitur OPAC, tingkat akses repository, serta survei kepuasan pengguna terhadap layanan e-jurnal dan e-book. Transformasi digital perpustakaan telah meningkatkan aksesibilitas informasi akademik, namun masih menghadapi tantangan optimalisasi fitur pencarian dan literasi digital pengguna. Hasil penelitian hanya menilai layanan digital berdasarkan observasi dan studi literatur, diperlukan survei lebih lanjut untuk mendapatkan perspektif pengguna yang lebih komprehensif.

4. Niken Febry Yanti dan Elva Rahmah (2025)

Melakukan penelitian dengan judul Implementasi Layanan Perpustakaan Menggunakan Aplikasi Senayan Library Management System (SLiMS) di Perpustakaan Politeknik Negeri Padang. Penelitian ini mengkaji implementasi SLiMS (Sistem Manajemen Perpustakaan Senayan) di Perpustakaan Politeknik Negeri Padang sebagai strategi meningkatkan layanan perpustakaan.³⁵ Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Tujuan dan standar kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan konteks sosial-politik. Hasil penelitian ini bahwa ketersediaan beragam layanan digital menjadi bukti komitmen. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, antara lain keterbatasan fitur pencarian OPAC, kurangnya promosi repository, keterbatasan koleksi e-book, dan kurangnya sosialisasi layanan e-jurnal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan digital secara berkelanjutan diperlukan guna memenuhi kebutuhan informasi pengguna secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SLiMS masih belum

³⁵Yanti, N. F., & Rahmah, E. Implementasi Layanan Perpustakaan Menggunakan Aplikasi Senayan Library Management System (SLiMS) di Perpustakaan Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Pustaka Budaya* 2025, 12(2), 240-255.

optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa agar SLiMS sepenuhnya efektif, diperlukan strategi implementasi yang lebih inklusif yang mendorong akses pengguna, memperkuat komitmen institusi, dan membangun kolaborasi berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan.

5. Tuwaji (2025)

Melakukan penelitian dengan judul Strategi peningkatan kompetensi dan profesi pustakawan pada era digital dalam tatakelola perpustakaan di Provinsi Papua.³⁶ Metode yang digunakan yaitu metodologi deskriptif kualitatif yang mewawancarai informan dari kalangan pustakawan, dan pengelola perpustakaan di provinsi papua. Strategi peningkatan kompetensi pustakawan pada era digital dianalisis dari tiga aspek yaitu usaha secara mandiri, usaha pemerintah dan usaha organisasi kepastakawanan. Dalam kesimpulanya disampaikan perlu adanya kebijakan yang tepat, diklat berkelanjutan, pengawasan ketat program uji kompetensi dan sertifikasi pustakawan. Termasuk adanya pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi menjadi dasar penilaian akreditasi lembaga perguruan tinggi. Tujuan penelitian tidak terlalu jelas di cantumkan dalam jurnal.

Hasil penelitian menunjukan strategi meningkatkan kompetensi pustakawan Papua yang dilakukan secara mandiri oleh pustakawan yaitu Beberapa data menunjukan kompetensi pustakawan di provinsi papua masih rendah. Strategi meningkatkan kompetensi pustakawan Papua dilakukan oleh pihak pemerintah khususnya pemerintah pusat. Peningkatan kompetensi pustakawan Provinsi Papua yang dilakukan oleh organisasi kepastakawanan. Diukur melalui keterlibatan dalam organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Daerah Provinsi Papua yang mencapai 87,5%.

6. Catrina Ratu Tunggal Agung (2025)

Melakukan penelitian dengan judul strategi kebijakan peningkatan literasi masyarakat kota Bogor melalui literasi SQUAD³⁷ . Metode penelitian

³⁶Tuwaji, T. *Strategi peningkatan kompetensi dan profesi pustakawan pada era digital dalam tatakelola perpustakaan di Provinsi Papua*. Jurnal Kepustakawanan Indonesia 2025, 1(2), 63-88.

³⁷Agung, C. R. T. *Strategi kebijakan peninkatan literasi masyarakat kota bogor melalui literasi*. Journal of Innovation Research and Knowledge 2025, 4(11), 8181-8192. 2025, 5(2).

menggunakan metodologi Kualitatif. Tujuan pada rencana strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2019-2024 adalah Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat dan Terwujudnya pengelolaan arsip yang berkualitas. Hasil analisis skoring pada tabel skor tertinggi dari kriteria analisis kebijakan adalah Program literasi Squad. Fokusnya adalah mencapai target capaian yang telah ditetapkan, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Penulisan ini mengusulkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, memanfaatkan inventarisasi data dan bahan rujukan yang bertujuan untuk meningkatkan IPLM, mendorong pembelajaran dan literasi berkelanjutan di Masyarakat.

7. Diah Sa'adiah (2025)

Melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Layanan Informasi Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten selama Pandemi COVID - 19. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas layanan informasi daring di Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.³⁸

Metode yang digunakan adalah studi literatur dan observasi terhadap platform digital perpustakaan, seperti OPAC, repository, layanan e-book, dan e-jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi efektivitas dilakukan dengan analisis fitur OPAC, tingkat akses repository. survei kepuasan pengguna terhadap layanan e-jurnal dan e-book. Transformasi digital perpustakaan telah meningkatkan aksesibilitas informasi akademik, namun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi fitur pencarian dan literasi digital pengguna

8. Chelinda Amalia Santoso & Diana Hertati (2025)

Pelayanan Publik Berbasis E-Government dalam Layanan Sirkulasi Buku Melalui INLISLite di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.³⁹ Metode penelitian menggunakan studi literatur dari jurnal, data situs resmi, dan analisis praktik magang. Fokus utamanya pada layanan sirkulasi buku, termasuk

³⁸Sa'adiah, D. *Efektivitas Layanan Informasi Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten selama Pandemi COVID-19*. Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi

³⁹Santoso, C. A., & Hertati, D. *Pelayanan Publik Berbasis E-Government dalam Layanan Sirkulasi Buku Melalui INLISLite di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur*. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced 2025, 3(2), 720-732.

peminjaman dan pengembalian, dan pengelolaan perpustakaan. Hasil kajian ini menunjukkan keberadaan INLISLite memberi berbagai manfaat dalam hal efisiensi dan transparansi pelayanan, namun terdapat tantangan seperti ketidakstabilan jaringan internet dan keamanan sistem. Diperlukan perhatian terhadap berjalannya layanan sirkulasi buku agar tetap stabil dan pengembangan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada.

Dari uraian penelitian terdahulu dapat ditelaah kembali melalui tabel 1.5.

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan dengan Penelitian Ini
	1	2	3	4	5
1	Rydhho Febri Ramadhan & Vicka Tamaya (2021) <i>Standar Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pelayanan Perpustakaan ITERA</i>	Mengkaji perubahan dalam layanan publik selama pandemi Covid-19 di Perpustakaan ITERA	Kualitatif; wawancara, observasi situs web dan SOP layanan	Pandemi Covid-19 memengaruhi layanan publik, menghasilkan inovasi dalam layanan Perpustakaan Institut Teknologi Sumatera	Persamaan: Membahas layanan perpustakaan di masa pandemi. Perbedaan: Fokus pada standar pelayanan publik, bukan implementasi kebijakan digital berbasis teori Edward III
2	Wildani A., dkk (2022) <i>Strategi Optimalisasi Pelayanan Sirkulasi Dengan Pendekatan Model Harapan Sosial: Studi Pada Perpustakaan UNRI Pascagangguan Alam</i>	Mengetahui gambaran optimalisasi perbaikan ruangan sirkulasi paska kerusakan infrastruktur akibat gangguan alam	Research and Development (R&D); diagram fase riset harapan sosial	Pengguna merasa puas dengan pengembangan yang dilakukan; pelayanan sirkulasi paska kerusakan infrastruktur berjalan optimal	Persamaan: Optimalisasi layanan perpustakaan. Perbedaan: Fokus pada pasca gangguan alam, bukan implementasi kebijakan digital
3	Dian Sinaga & Fitri Perdana (2023) <i>Strategi Pengembangan Koleksi Perpustakaan Umum di Era Kenormalan Baru</i>	Mengetahui strategi pengembangan koleksi perpustakaan umum bagi pemustaka di era new normal	Kualitatif	Strategi dapat disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi masyarakat sekitar perpustakaan, berorientasi pada pengguna	Persamaan: Layanan perpustakaan di era new normal. Perbedaan: Fokus pada pengembangan koleksi, bukan implementasi kebijakan digital
4	Cantika Fitria Putri Fardi, dkk (2024) <i>Perkembangan Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi</i>	Menelaah perkembangan pelayanan perpustakaan perguruan tinggi di	Narrative literature review	Pelayanan perpustakaan berkembang seiring teknologi; inovasi digital seperti	Persamaan: Perkembangan layanan perpustakaan perguruan tinggi berbasis digital. Perbedaan: Bersifat

No	Peneliti/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan dengan Penelitian Ini
		Indonesia		layanan ask librarian, book delivery, library movie show	review literatur, tidak mengkaji implementasi kebijakan secara spesifik
5	Diah Sa'adiah (2025) <i>Efektivitas Layanan Informasi Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten selama Pandemi COVID-19</i>	Menganalisis efektivitas layanan informasi daring di Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Studi literatur dan observasi platform digital (OPAC, repository, e-book, e-jurnal)	Transformasi digital meningkatkan aksesibilitas informasi akademik, namun menghadapi tantangan optimalisasi fitur dan literasi digital pengguna	Persamaan: Efektivitas layanan digital perpustakaan UIN. Perbedaan: Fokus hanya pada efektivitas layanan, bukan implementasi kebijakan dengan teori Edward III
6	Niken Febry Yanti & Elva Rahmah (2025) <i>Implementasi Layanan Perpustakaan Menggunakan Aplikasi SLiMS di Perpustakaan Politeknik Negeri Padang</i>	Mengkaji implementasi SLiMS sebagai strategi meningkatkan layanan perpustakaan	Studi kasus kualitatif; wawancara mendalam	Penggunaan SLiMS belum optimal; diperlukan strategi implementasi yang lebih inklusif dan kolaborasi antar pemangku kepentingan	Persamaan: Implementasi sistem layanan digital perpustakaan. Perbedaan: Fokus pada aplikasi SLiMS, bukan kebijakan makro berbasis teori Edward III
7	Tuwaji (2025) <i>Strategi Peningkatan Kompetensi dan Profesi Pustakawan pada Era Digital dalam Tatakelola Perpustakaan di Provinsi Papua</i>	Menganalisis strategi peningkatan kompetensi pustakawan pada era digital di Provinsi Papua	Deskriptif kualitatif; wawancara informan pustakawan dan pengelola perpustakaan	Kompetensi pustakawan Papua masih rendah; diperlukan kebijakan tepat, diklat berkelanjutan, uji kompetensi, dan sertifikasi	Persamaan: Kompetensi SDM pustakawan di era digital. Perbedaan: Fokus pada strategi kompetensi, bukan implementasi kebijakan layanan digital secara komprehensif
8	Catrina Ratu Tunggal Agung (2025) <i>Strategi Kebijakan Peningkatan Literasi Masyarakat Kota Bogor Melalui Literasi SQUAD</i>	Menganalisis strategi kebijakan peningkatan literasi masyarakat Kota Bogor	Kualitatif; analisis skoring kebijakan	Program Literasi SQUAD memperoleh skor tertinggi; merekomendasikan kebijakan komprehensif untuk meningkatkan IPLM dan literasi berkelanjutan	Persamaan: Kebijakan layanan perpustakaan untuk literasi. Perbedaan: Fokus pada literasi masyarakat umum, bukan implementasi kebijakan digital perpustakaan perguruan tinggi

No	Peneliti/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan dengan Penelitian Ini
9	Diah Sa'adiyah (2025) <i>Efektivitas Layanan Informasi Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten selama Pandemi COVID-19</i>	Menganalisis efektivitas layanan informasi daring di Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Studi literatur dan observasi platform digital perpustakaan (OPAC, repository, e-book, e-jurnal)	Aksesibilitas informasi akademik meningkat melalui transformasi digital; masih terdapat tantangan optimalisasi fitur pencarian dan literasi digital	Persamaan: Layanan digital perpustakaan UIN berbasis observasi. Perbedaan: Tidak menggunakan teori implementasi kebijakan; hanya penilaian layanan melalui literatur
10	Chelinda Amalia Santoso & Diana Hertati (2025) <i>Pelayanan Publik Berbasis E-Government dalam Layanan Sirkulasi Buku Melalui INLISLite di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur</i>	Mengkaji pelayanan publik berbasis e-government melalui INLISLite pada layanan sirkulasi buku	Studi literatur dari jurnal, data situs resmi, dan analisis praktik magang	INLISLite memberi manfaat efisiensi dan transparansi; tantangan ketidakstabilan jaringan internet dan keamanan sistem masih ada	Persamaan: Layanan digital perpustakaan berbasis e-government. Perbedaan: Fokus pada sirkulasi buku via INLISLite, bukan implementasi kebijakan dengan teori Edward III di PTKIN

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Dari tabel 1.5 menunjukkan gambaran singkat secara umum pada penelitian terdahulu dimana banyak membahas pada layanan digital fokus pada kebijakan yang bisa jadi kebijakan yang tidak tertulis atau pun kebijakan yang memiliki payung hukum, tidak ada bahasan fokus istilah kebijakan tersorot meskipun pelayanan digital yang ditunjukkan merupakan bagian dari kebijakan, lebih kepada layanan teknisnya yaitu salah satunya penggunaan pemilahan aplikasi yang digunakan di pelayanan.

Kesamaan dari penelitian diatas adalah mengenai layanan perpustakaan secara online pada masa new normal meskipun dari segi teknis penggunaan digital akan berbeda setiap perpustakaan.

Metode penelitian menggunakan studi literatur dari jurnal, data situs resmi, dan analisis praktik magang. Fokus utamanya pada layanan sirkulasi buku, termasuk peminjaman dan pengembalian, dan pengelolaan perpustakaan. Hasil kajian ini menunjukkan keberadaan INLISLite memberi berbagai manfaat dalam

hal efisiensi dan transparansi pelayanan, namun terdapat tantangan seperti ketidakstabilan jaringan internet dan keamanan sistem. Diperlukan perhatian terhadap berjalannya layanan sirkulasi buku agar tetap stabil dan pengembangan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada.

Gambaran singkat secara umum pada penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi pada teknisnya yaitu penggunaan pemilahan aplikasi yang digunakan di pelayanan. Kesamaan dari penelitian diatas adalah mengenai layanan perpustakaan secara online pada masa new normal meskipun dari segi teknis penggunaan digital akan berbeda setiap perpustakaan.

Penelitian terdahulu hanya membahas kebijakan teknis pada masa covid saja dan pada masa new normal saja. Dibawah ini uraian lebih lanjut dari penelitian terdahulu dan kebaruan dari penelitian penulis ditinjau dari beberapa hal yaitu:

1. Dimensi Waktu Lebih, Penelitian terdahulu banyak berfokus hanya pada masa pandemi Covid-19 atau hanya era new normal. Kebaruan dari peneliti yang selanjutnya akan diteliti menggabungkan keduanya (masa pandemi → transisi → new normal), sehingga lebih komprehensif (dimensi waktu lebih luas).
2. Pendekatan Kebijakan (Policy Implementation), jika penelitian terdahulu banyak membahas layanan, strategi teknis, atau aplikasi tertentu, penelitian ini menekankan implementasi kebijakan berdasarkan teori kebijakan (George Edward). Hal ini memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan digital.
3. Lokus Spesifik & Kontekstual, tidak sekadar meneliti perpustakaan umum atau perguruan tinggi lain, kebaruan penelitian ini fokus pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang secara institusional memiliki karakteristik unik sebagai PTKIN dengan kombinasi layanan akademik dan keislaman, serta menambahkan ruang baca magister yang belum pernah diteliti secara khusus.
4. Relevansi Praktis, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bermanfaat praktis untuk pengembangan layanan digital di lingkungan PTKIN, terutama di perpustakaan pusat dan pasca UIN Sunan Gunung Djati, serta menjadi masukan kebijakan bagi pimpinan universitas.